

TESIS

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (MKn)



OLEH :

Devis Sabrian, S.H
NIM : 1920123042

Komisi Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn.

Dr. M. Hasbi, S.H.,M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI
PEJABAT UMUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr)**

Devis Sabrian, SH, NIM 1920123042, Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2023, 162 halaman

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan oleh semua orang tidak terkecuali Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam Penulisan ini penulis meneliti bahwa Notaris telah merubah Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. TERGUGAT berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr mengenai Perbuatan Melawan Hukum antara PT Bonita Indah sebagai Pengugat berlawanan dengan Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn (Tergugat), Bonar Saragi (Turut Tergugat I), Mangapul (Turut Tergugat II). Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu : Apa yang melatarbelakangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr. Apa akibat hukumnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan menggunakan data sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian merubah isi Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan para pihak, dan jelas terbukti melanggar pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dibuktikan dengan Putusan Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Akibat hukumnya atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yaitu Penggugat mengalami kerugian materil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.328.675.366,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), namun dalam keputusan hakim, notaris dinyatakan ditolak oleh hakim.

Kata kunci: Akta Notaris, Notaris, Minute Akta.

**ACTS AGAINST THE LAW COMMITTED BY A NOTARY IN CARRYING
OUT HIS POSITION AS A PUBLIC OFFICIAL
(Case Study court of Pekanbaru Number 247/PDT.G/2016/PN.Pbr)**

**Devis Sabrian, SH, NIM 1920123042, Postgraduate Notary Notary Study
Program, Faculty of Law, Andalas University Padang, 2022, 162 pages**

ABSTRACT

That it is clear and clear that the Notary has committed an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Where has changed the Minutes of Notarial Deed number 149 Cooperation Agreement between the Plaintiff and the Co-Defendant. THE DEFENDANT pursuant to Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning Notaries must bear the brunt of all losses arising from his legal actions as stated in the Pekanbaru District Court Decision Number 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr concerning Unlawful Acts between PT Bonita Indah as Plaintiff and Notary Neni Sanitra, S.H., M.Kn (Defendant), Bonar Saragi (Co-Defendant I), Mangapul (Co-Defendant II). The author raises 2 (two) problem formulations, namely: What is the background of the unlawful act committed by a notary in carrying out his position regarding the Pekanbaru District Court Decision Number 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr. What are the legal consequences of the unlawful act committed by a notary in carrying out his position regarding the Decision of the Pekanbaru District Court Number 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr. This study uses the Normative Method using secondary data and 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the contents of the Minutes of Notary Deed No. 149 Cooperation Agreement without the consent of the parties, and clearly proven to have violated Article 48 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public which has been proven by the Decision of the Regional Notary Examination Assembly Session of Riau Province number: 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI /2012. The legal consequences for the unlawful act committed by a notary in carrying out his position related to the Decision of the Pekanbaru District Court Number 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, namely that the Plaintiff suffered a material loss which, if valued in the form of money, amounted to Rp. 2,328,675,366,- (two billion three hundred twenty eight million six hundred seven five thousand three hundred and sixty six rupiah), but in the judge's decision, the notary was declared rejected by the judge.

Keywords: Notary Deed, Notary, Minute Deed.